

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Propinsi-propinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar dalam mengelola daerahnya masing-masing melahirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Daerah menghendaki diberikan keleluasaannya dalam mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya pemerataan dana pembangunan. Hal inilah yang telah membawa pemberlakuan kebijakan baru pemerintah tentang Otonomi Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dengan cara mengelola pendapatan daerahnya sendiri.

Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Manajemen Sektor Publik.

Manajemen keuangan sektor publik (Pemerintah Pusat dan Daerah) secara sederhana didefinisikan, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya. Sejak era reformasi, khususnya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan

mampu mengoptimalkan pendanaan dari sumber pendapatan asli daerah. Karena sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terbagi atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kedua jenis pajak tersebut lah yang menjadi komponen dari Pajak Daerah dan berkontribusi dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, berupa layanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi Jasa Usaha, berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, dan Retribusi Perizinan Tertentu, pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah Kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan juga retribusi daerah ikut membantu dalam menambah besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun besarnya perolehan pendapatan asli daerah menjadi fokus karena menunjukkan “kemampuan” daerah dalam mengelola potensinya, di samping hal tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan persentase besarnya hak keuangan lembaga legislatif daerah. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.

Penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2010) tentang “analisis Pengaruh Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Bengkulu”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam Peningkatan Pendapatan asli Daerah. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan karena menjadi potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD dalam setiap pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian kembali tentang Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya : *Pertama*, objek penelitian sebelumnya adalah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, sementara penelitian ini adalah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Kedua*, Tahun penelitian sebelumnya adalah pada Tahun 2004-2008, sementara penelitian ini adalah pada tahun 2008-2014. Berdasarkan latar belakang tersebut Maka Penulis tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.**”

1.2 Perumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara Parsial?
2. Seberapa besar Pengaruh dan Kontribusi Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara Parsial?
3. Seberapa besar Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan secara Simultan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Muara Enim tahun 2008 sampai 2014.
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang diteliti.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaruh dan besar Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui Pengaruh dan besar Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui Pengaruh dan besar Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengimplementasian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk informasi atau sebagai referensi bagi pembaca, sekaligus sebagai acuan untuk bahan perbandingan dalam menyusun Laporan Skripsi.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang mencerminkan susunan materi yang akan dibahas pada laporan akhir ini. Kelima bab dalam sistematika penulisan laporan akhir ini akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, kerangka pemikiran penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Seberapa Besar Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian penulis akan memberikan saran.